

Pelaksanaan Program Millennium Challenge Account (MCA) dan Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia

Asra Virgianita dan Rizky Mahanani Pratiwi

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia

ABSTRACT

Kajian ini membahas mengenai program hibah Millennium Challenge Account (MCA) di Indonesia yang merupakan salah satu proyek bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS). Para ahli berpendapat bahwa pemberian bantuan luar negeri selalu terkait dengan motif negara donor. Studi ini menginvestigasi motif AS dalam pemberian hibah MCA ke Indonesia. Ditemukan bahwa MCA dirumuskan untuk motif politik dan ekonomi. Motif politik terkait dengan upaya AS untuk menunjukkan komitmen dalam isu pelestarian lingkungan global. Motif ekonomi terkait dengan upaya-upaya AS untuk melindungi perusahaan minyak dan gas AS di Indonesia terhadap tuntutan untuk masalah lingkungan dan sosial, perluasan pasar AS untuk produk kesehatan dan farmasi, dan pembentukan iklim yang kondusif bagi perusahaan AS.

Kata-Kata Kunci: *MCA, bantuan luar negeri, motif ekonomi, motif politik, Amerika Serikat, Indonesia.*

This study discussed the Millennium Challenge Account (MCA) grant program in Indonesia as one type of the United States (U.S.) foreign aid project. Many scholar argues that the provision of foreign aid is always associated with the motives of donor countries. This study investigates the U.S. motives in the provision of MCA grants to Indonesia and found that it was formulated for political and economy motives. Political motives of MCA program associated with the effort of the U.S. to show the U.S. commitment in preserving the global environment. While the economic motives associated with the attempts to protect the U.S. oil and gas companies in Indonesia towards demands for environmental and social issues, the expansion of the U.S. market for health and pharmaceutical products, and the formation of favourable climate for the U.S. companies.

Keywords: *MCA, foreign aid, economic motives, political motives, United States, Indonesia*

Bantuan luar negeri adalah fenomena yang berkembang pasca Perang Dunia II. Bagi Amerika Serikat (A.S.) yang merupakan pemrakarsa awal bantuan luar negeri, motif keamanan nasional merupakan motif yang utama hingga awal tahun 1990-an, yang kemudian mengalami perluasan di tahun-tahun berikutnya seiring dinamika internasional. Pada akhir tahun 1990-an, tujuan pemberian bantuan dikategorikan dalam 6 (enam) poin, yaitu: (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pertanian, (2) pembentukan demokrasi berkelanjutan, (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, (4) stabilisasi populasi dunia dan pemeliharaan kesehatan manusia, (5) memelihara lingkungan hidup yang berkelanjutan, (6) mempromosikan bantuan kemanusiaan (Degnbol & Pedersen 2003, 77). Namun peristiwa 9/11 telah membawa isu keamanan nasional menjadi isu sentral dalam pemberian bantuan luar negeri AS. Pada bulan Maret tahun 2002, Presiden George W. Bush menggagas *Millennium Challenge Account* (MCA) berupa program pendanaan untuk pengurangan kemiskinan global. Gagasan Presiden Bush dalam MCA yang bertujuan untuk “*reduce poverty through economic growth*” terkait dengan upaya AS untuk mengurangi kemiskinan global yang dapat mengancam keamanan dan kepentingan nasional AS. Pemerintah AS percaya bahwa kemiskinan akan mengarah pada ketidakstabilan dan hal tersebut rawan menjadi sarana berkembangnya terorisme (Radelet 2003, 104).

Untuk menjadi negara penerima hibah MCA, sebuah negara harus memenuhi serangkaian kriteria yaitu, berdasarkan pendapatan per kapitanya merupakan kategori *Low Income Country* (LIC) atau *Lower Middle Income Country* (LMIC), secara hukum tidak bertentangan sebagai negara penerima bantuan AS, dan memenuhi ketentuan dalam indikator-indikator MCA. Menurut *Millennium Challenge Corporation* (MCC) yang merupakan sebuah badan independen yang dibentuk oleh kongres AS untuk mengurus administrasi kegiatan MCA dengan negara-negara mitra, ukuran yang digunakan dalam MCA terdiri dari 3 kategori yaitu pemerintahan yang adil (*ruling justly*), investasi sumber daya manusia (*investing in people*), dan kebebasan untuk mengarahkan dan melakukan kegiatan ekonomi (*economic freedom*) dengan berbagai indikator (MCC 2010b).

Indikator untuk kategori *ruling justly* terdiri dari terjaminnya hak-hak politik (*political rights*), hak-hak sipil (*civil liberties*), kontrol terhadap penggunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi (*control of corruption*), pemerintahan yang efektif (*government effectiveness*), penegakan hukum (*rule of law*), dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan kebebasan berekspresi, berorganisasi dan media massa (*voice and accountability*). Sementara itu, indikator untuk kategori *investing people* terdiri dari tingkat imunisasi terhadap anak-

anak (*immunization rate*), belanja negara untuk sektor kesehatan (*health expenditures*), belanja negara untuk pendidikan primer/dasar (*primary educations expenditures*), jumlah anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan dasar (*girl's primary education completion*), dan manajemen sumber daya alam (*natural resources management*). Adapun untuk kategori *economic freedom* indikator yang digunakan adalah kualitas regulasi (*regulatory quality*), hak kepemilikan dan akses atas tanah (*land rights and access*), kemampuan untuk memulai bisnis (*business start-up*), kebijakan perdagangan (*trade policy*), tingkat inflasi (*inflation*) dan kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Syarat yang ditetapkan oleh MCC kepada negara penerima hibah untuk tahun 2009 adalah minimal separuh dari 6 indikator dalam kategori *ruling justly* dan *economic freedom* skornya berada diatas median termasuk untuk indikator *control of corruption*. Sementara untuk kategori *investing in people* minimal 3 dari 5 indikatornya memiliki skor diatas median (MCC 2010a & b).

Program MCA terdiri dari dua jenis yaitu hibah awal yang disebut *threshold program* yang ditujukan untuk membantu negara-negara yang *eligible* untuk bantuan penuh (*compact program*) yang dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun (*short term*). Untuk *compact program* disediakan dana lebih besar dan periode waktu implementasi yang sifatnya *multi-years*. Awalnya, Indonesia mendapatkan *threshold program* MCA pada tahun 2007-2009 sebesar 55 juta dolar AS (MCC, 2007) yang ditujukan untuk perbaikan dua indikator, yaitu *control of corruption* dan *immunization rate*. Dalam perjalanannya, Indonesia kemudian dinyatakan layak untuk mendapatkan *compact program* pada bulan Desember 2008. Akhirnya, MCC memberikan dana hibah sebesar 600 juta dolar AS kepada Indonesia dalam jangka waktu lima tahun. Program ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan tiga proyek yaitu Proyek Kemakmuran Hijau atau berbasis lingkungan (*Green Prosperity Project*), Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Gangguan Pertumbuhan /*Stunting (Community based Health and Nutrition to Reduce Stunting)*, dan Proyek Modernisasi Sistem Pengadaan Publik (*Modernization Procurement Project*).

Pemberian hibah ini tentu menimbulkan pertanyaan karena Indonesia justru mengalami penurunan performa dalam pencapaian indikator-indikator yang ditetapkan. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada semua indikator termasuk *control of corruption*. Hal ini terlihat dalam *scorecard* Indonesia tahun 2010 dan 2011. Persentase performa penanganan korupsi Indonesia pada *scorecard* tahun 2009 adalah sebesar 56%. Performa ini mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 41% dan bahkan menjadi 26% pada tahun 2011 (MCC 2011). Selain itu, Indonesia masih dianggap memenuhi syarat untuk

mendapatkan *compact* MCA karena Kongres AS memberikan otoritas kepada MCC untuk mengkategorikan Indonesia sebagai *low income country* (LIC) sejak tahun 2010 hingga 3 tahun kedepan, padahal Indonesia telah masuk negara *Middle Income Countries* (MIC) pada tahun yang sama. Dengan kondisi-kondisi tersebut, hibah penuh (*Compact Program*) MCA Indonesia kemudian ditandatangani pada tahun 2011. Hal ini memunculkan pertanyaan “Mengapa AS memberikan hibah *Compact Program* kepada Indonesia pada tahun 2011 disaat terjadi penurunan performa capaian indikator-indikator MCA?” Dengan menfokuskan pada pertanyaan tersebut, kajian ini ditujukan untuk memahami konteks pemberian bantuan luar negeri AS, menginvestigasi dan menganalisis motif AS dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia, khususnya dalam program MCA.

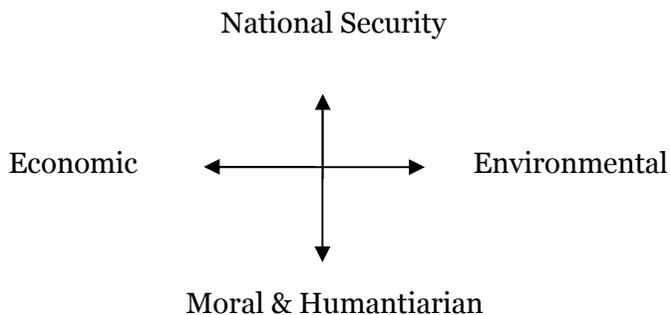
Secara teoritis dan praktis, terdapat beberapa motif donor dalam menyalurkan bantuan luar negeri yaitu motif (1) altruisme, (2) ideologi politik, kebijakan luar negeri, dan kepentingan komersial, serta (3) pembangunan ekonomi (Trap, 2000). Motif altruisme berkaitan dengan alasan kemanusiaan dipentingkan oleh negara donor terkait dengan kemiskinan dan kesenjangan di negara penerima bantuan. Motif ideologi politik, salah satu contohnya implementasi bantuan luar negeri pada masa Perang Dingin sebagai upaya menahan pengaruh antara blok Barat dan Timur. Sementara itu, motif pembangunan ekonomi digunakan untuk merealisasikan pembangunan di negara penerima bantuan sekaligus untuk penyebaran demokrasi, isu gender, dan ekspansi pasar (termasuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing).

Kebijakan bantuan luar negeri sangat berkaitan dengan kepentingan politis dan pertimbangan strategis negara donor. Hal ini dipandang lebih penting daripada kepentingan ekonomi dan performa politis negara penerima bantuan (Alesina dan Dollar 1998). Bantuan luar negeri, seperti halnya diplomasi, propaganda, atau aksi militer adalah instrumen dalam sebuah negara untuk menanamkan kontrol atau pengaruh. Dari pandangan negara donor, bantuan luar negeri adalah instrumen kebijakan luar negeri untuk melakukan hubungan politik dan diplomatik dengan negara berkembang, meningkatkan stabilitas negara yang strategis, melakukan ekspansi terhadap pasar ekspor (Piscard 2008, 7). Berbagai motif tersebut menjadi basis untuk menjelaskan pola alokasi dan distribusi bantuan luar negeri. Selain itu, perlu dicatat bahwa, motif-motif ini seringkali tidak berdiri sendiri, karena dalam suatu kebijakan, alasan-alasan tersebut dapat saling tumpang tindih.

Dalam kaitan tumpang tindihnya motif yang mengiringi penyaluran bantuan luar negeri, Degnbol & Pedersen (2003, 17) menyuguhkan sebuah skema yang membagi motif dan tujuan bantuan luar negeri

dalam 4 kategori yaitu motif keamanan nasional, motif ekonomi, motif lingkungan, motif moral dan kemanusiaan. Melalui skema tersebut dapat dijelaskan bahwa motif dan kepentingan donor dapat dilihat tidak saja secara tunggal akan tetapi dapat saling beririsan (lihat gambar 1). Berbagai penjelasan tersebut melandasi hipotesis artikel ini bahwa motif ekonomi dan politik AS menjadi landasan utama pelaksanaan Program MCA di Indonesia.

Gambar 1. Motif dan Kepentingan Donor



(Degnbol & Pedersen 2003,17)

Merujuk pada tiga proyek MCA yang dirancang dengan berfokus pada isu lingkungan, kesehatan dan pengadaan barang, motif politik terkait *image building* dalam implementasi *Green Prosperity Building Project* dan kepentingan ekonomi/komersial dalam ketiga proyek keseluruhan menjadi indikator motif politik dan ekonomi AS dalam pelaksanaan MCA di Indonesia.

Program MCA di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, program MCA Indonesia diawali dengan hibah *Threshold Program* pada tahun 2006. Ada dua fokus utama program tersebut yaitu *control of corruption* dan *immunization rate*. Proyek ini bernilai 55 juta dolar AS ini yang dijalankan oleh *the United States Agency for International Development* (USAID 2007). Program *Control of Corruption* dalam skema tersebut dinamakan *the Millennium Challenge Corporation Threshold Program for Indonesia: Control of Corruption Project* (MCC-ICCP) yang merupakan program kontrak 2 tahun bernilai 35 juta dolar AS terhitung sejak tanggal 11 April 2007 sampai dengan 10 April 2009. Proyek MCC-ICCP terdiri dari tiga komponen yaitu bantuan teknis, pelatihan, dan

penyediaan peralatan khusus yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia. MCC dan USAID mengklaim bahwa pelaksanaan *Threshold Program* selama 2 tahun ini memberikan hasil yang cukup baik. Program MCC-ICCP ini berhasil melaksanakan beberapa kegiatan antara lain (1) pelatihan untuk lebih dari 2.000 pelatih dan para Hakim tentang Pedoman Perilaku Hakim, (2) mempublikasikan 5803 keputusan-keputusan MA di situs Mahkamah Agung, (3) menyusun uraian pekerjaan untuk 850 posisi penting di Peradilan, (4) melakukan inventarisasi asset Pengadilan di 4 Propinsi di Indonesia, (5) meluncurkan kampanye public mengenai anti pencucian uang di televisi, radio, dan media cetak, serta (6) pengadaan piranti keras, lunak dan peralatan di 5 pusat pengadaan barang dan jasa elektronik pemerintah (USAID 2013).

Meskipun MCC dan USAID menilai bahwa program ini sukses namun pada kenyataannya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia masih berada pada skor yang rendah. Indonesia menempati peringkat 111 dari 180 negara pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2011, CPI Indonesia mencapai skor 3,0 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 100 dari 183 negara (Transparency International 2009; Jakarta Post 2011). Meskipun Indonesia mengalami peningkatan skor dan peringkat CPI negara-negara di dunia, peningkatan ini belum dapat dikatakan signifikan dalam upaya pengendalian korupsi di Indonesia. Adapun untuk program imunisasi dalam *Threshold Program* MCA Indonesia, didesain sebuah program yang disebut dengan *The MCC Indonesia Immunization Project* (MCC-IIP). Sama dengan program *Control of Corruption*, program ini merupakan hibah yang diberikan selama 2 tahun namun dengan nilai lebih kecil yaitu 20 juta dolar AS. Program ini menyediakan bantuan teknis kepada Pemerintah Indonesia dalam *Expanded Program on Immunization* (EPI) yang dijalankan oleh *Partnership for Child Health Care, Inc.* (PCHC) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (USAID 2013).

PCHC bekerja dengan pemerintah provinsi dan kotamadya/kabupaten untuk meningkatkan angka imunisasi campak dan DPT di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai indikator MCA dalam bidang imunisasi sebanyak 80.5 % atau lebih. Disamping itu, PCHC juga berkomitmen meningkatkan kapasitas Indonesia untuk keberlangsungan peningkatan angka imunisasi setelah proyek berjalan. Proyek ini dijalankan pada provinsi-provinsi dengan penduduk yang padat. Provinsi yang terpilih adalah : Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai dari *Threshold Program* MCC IIP adalah peningkatan jumlah anak yang mendapatkan imunisasi DPT dan campak pada daerah-daerah proyek sejak bulan Juni 2007 hingga Maret 2009. Pada

periode akhir program yaitu pada Januari hingga Maret 2009, jumlah anak yang mendapatkan imunisasi hampir mendekati jumlah enam juta anak.

Setelah menjalani *Threshold Program* selama 2007-2009, walau dengan indeks korupsi yang masih di atas median, pemerintah AS menyetujui proposal hibah *Compact Program* MCA untuk Indonesia pada tanggal 22 November 2011 dengan tiga proyek utama untuk dijalankan selama 5 tahun. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan nilai proyek sebesar 600 juta dolar AS, program ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi melalui 3 proyek. Proyek-proyek ini terdiri dari *Green Prosperity Project*, *Community based health and nutrition to reduce stunting*, dan *Modernization Procurement Project* (U.S. Embassy Jakarta 2011). Ketiga program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui peningkatan produktivitas, berkurangnya biaya energi, dan membaiknya pelayanan publik di sektor pengadaan barang dan jasa. Program tersebut dinilai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2010-2014.

Green Prosperity Project secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin. Proyek ini ditangani oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Secara khusus, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan pembangkit listrik tenaga terbarukan berbasis komunitas untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Proyek Kemakmuran Hijau dikonsentrasikan di provinsi dan kabupaten yang memiliki potensi tertinggi dalam pengentasan kemiskinan dan tujuan lingkungan. Provinsi ini yaitu Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, *Community Based Health and Nutrition to Reduce Stunting* bertujuan untuk mengurangi dan mencegah berat badan kurang saat lahir dan pengerdilan masa kanak-kanak termasuk kekurangan gizi pada anak-anak di daerah proyek. Lebih jauh, proyek ini bertujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga lewat penghematan biaya, pertumbuhan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi. Lokasi target kegiatan yang sudah ditetapkan adalah beberapa kabupaten dengan tingkat *stunting* yang relatif tinggi seperti provinsi Banten, Jawa

Tengah dan Jawa Timur. Proyek ini berada dibawah koordinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Proyek ketiga yang diusung *Compact Program MCA* di Indonesia adalah *Modernization Procurement Project*. Proyek ini dilaksanakan dibawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Indonesia yang dirancang untuk mempercepat agenda reformasi pengadaan/pembelian barang dan jasa pemerintah Indonesia; dan mengubah operasi sistem pengadaan/pembelian publik di Indonesia. Tujuan dari proyek ini adalah penghematan biaya dan efisiensi dari barang dan jasa yang dibeli, dengan memastikan kualitasnya memuaskan kebutuhan publik, serta untuk memperoleh penyerahan layanan publik sebagaimana direncanakan (MCA Indonesia 2011). Penghematan ini akan mengarah pada penyediaan lebih besar barang dan jasa ke ekonomi yang akan secara positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Proyek ini terkait dengan *Threshold Program MCA* pada bidang pengendalian korupsi di Indonesia melalui pengenalan sistem dan praktek pembelian/pengadaan barang secara moderen di Indonesia. Dari proyek-proyek yang dicanangkan seolah memperlihatkan bahwa program MCA ditujukan untuk kegiatan perbaikan lingkungan, kesehatan dan reformasi birokrasi. Namun berdasarkan pandangan bahwa implementasi bantuan luar negeri seringkali dilatarbelakangi oleh motif dan kepentingan donor, bagian berikut akan menganalisis motif dan kepentingan AS terkait implementasi program MCA di Indonesia.

Motif Politik dan Ekonomi dalam *Green Prosperity Project*

Program MCA adalah salah satu upaya kerjasama yang dilakukan Amerika Serikat dan Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini terutama terkait dengan Proyek Kemakmuran Hijau yang mendapatkan alokasi dana terbesar dalam Program MCA. Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pada upacara penandatanganan Perjanjian MCA Indonesia di Bali pada 19 November 2011, AS memberikan bantuan dalam *Green Prosperity Project* agar dapat menaikkan pendapatan masyarakat Indonesia sekaligus untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak dan kayu. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% hingga 41% pada tahun 2020 (U.S. Department of State 2011).

Namun bila dikaji lebih jauh, pemberian bantuan MCA Amerika Serikat ini merupakan salah satu upaya politis yang dilakukan AS untuk membuktikan komitmennya terdapat pelestarian lingkungan global diantara sorotan masyarakat dunia terhadap lemahnya komitmen AS

untuk isu lingkungan global. Hal ini ditunjukkan dengan sikap AS dalam Protokol Kyoto. AS telah menandatangani Protokol Kyoto pada tanggal 12 November 1998, namun tidak pernah meratifikasinya (UNFCCC 2013). Alasan AS tidak meratifikasi Protokol Kyoto didasari Resolusi Byrd-Hagel tahun 1997, dimana Senat AS memandang bahwa terjadi disparitas emisi yang harus direduksi oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang dapat merugikan perekonomian AS, termasuk hilangnya lapangan pekerjaan, gangguan terhadap perdagangan, peningkatan energi dan biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen di AS, serta kombinasi dari hal-hal tersebut (NCPFR 1997). Pandangan negatif AS terhadap Protokol Kyoto ditunjukkan dalam pernyataan Menteri Luar Negeri AS pada masa Presiden Bush, Condoleeza Rice, yang menuliskan bahwa,

“The Kyoto treaty is a case in point: whatever the factson global warming, a treaty that does not include China and exempts"developing" countries from tough standards while penalizing American industry cannot possibly be in Americas national interest.”
(Rice 2000)

Hal ini menegaskan sikap AS dalam Protokol Kyoto, dimana AS tidak akan berkomitmen untuk mengurangi emisi dengan alasan bahwa China dan negara berkembang tidak memiliki kewajiban yang sama dalam standar pengurangan emisi. Dalam isu lingkungan AS tidak pernah berada di posisi terdepan pada aksi penyelamatan lingkungan hidup dan bahkan menjadi pihak yang melawan dalam banyak inisiatif perlindungan lingkungan internasional, termasuk dalam Protokol Kyoto (Davenport 2006). Oleh karena itu, upaya AS untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi emisi pada proyek-proyek MCA adalah sebuah anomali. AS enggan untuk mengurangi emisi di dalam negeri, namun dalam bantuan luar negerinya AS mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi. Seluruh kegiatan dalam proyek ini diupayakan untuk dilakukan dengan mekanisme yang ramah lingkungan. Contohnya, dalam pengembangan PLTMH, masyarakat harus menjaga kelestarian air yang merupakan sumber daya utama kegiatan ini. Untuk menjaga kelestarian air, masyarakat harus menjaga hutan. Dengan demikian penggunaan PLTMH dapat dipertahankan dan masyarakat dapat terus menggunakan PLTMH untuk elektrifikasi. Elektrifikasi ini akan berguna bagi proses produksi maupun proses konsumsi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat seperti tujuan yang diharapkan oleh MCC.

Bila seluruh kegiatan dalam *Green Prosperity Project* diupayakan untuk mendukung pengembangan masyarakat Indonesia dengan penggunaan karbon yang rendah, seharusnya pemerintah AS dalam mendukung

pengembangan masyarakatnya juga berupaya untuk menggunakan jumlah karbon yang rendah. Bila di dalam negerinya Pemerintah AS enggan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan proses produksi dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan, maka pemberian hibah kepada Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat dengan mekanisme yang rendah karbon adalah upaya untuk melindungi perekonomian AS. Dengan adanya hibah ini, kewajiban untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan pembangunan yang lebih ramah lingkungan menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai penerima hibah. Dengan demikian, AS sebagai negara donor dapat terus menjaga proses produksi dan konsumsinya dengan kewajiban yang telah berkurang untuk mengurangi emisi karbon.

Aspek ekonomi yang lain terkait proyek ini terkait kegiatan eksplorasi perusahaan minyak dan gas AS. Salah satu daerah tujuan proyek ini adalah Provinsi Sulawesi Barat yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Selain minyak bumi dan gas alam, Sulawesi Barat juga kaya akan sumber daya uranium dan logam mulia. Dengan banyaknya sumber daya yang terdapat di Sulawesi Barat, sejumlah perusahaan asing sedang melakukan investasi dan eksplorasi migas di Sulawesi Barat diantaranya PT Conoco Phillips di Blok Kuma, PT Stat Oil di blok Karama Kabupaten Mamuju, PT Exxon Mobil di blok Suremana dan blok Mandar serta PT Marathon Indonesia di blok Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (Antara Sulsel 2013). Di beberapa kawasan proyek MCA yang lain yaitu Riau, Sumsel, Kaltim, Sulsel dan NTB juga terdapat perusahaan-perusahaan AS yang bergerak di sektor eksplorasi migas. Perusahaan ini antara lain adalah Chevron dan Conoco Philips. Riau dan Kaltim adalah daerah eksplorasi minyak dan gas Chevron, sedangkan sisanya merupakan daerah eksplorasi Conoco Philips (IATMI-SMUI 2013).

Merujuk penjelasan tersebut, dapat ditarik sebuah fakta bahwa terdapat perusahaan milik Amerika Serikat pada beberapa daerah yang terdaftar dalam proyek ini. Namun proses ekplorasi yang dilakukan Perusahaan AS memberikan dampak lingkungan secara langsung kepada masyarakat di daerah sekitar proyek. Proses eksplorasi migas ini rentan menimbulkan konflik. Beberapa protes muncul sebagai respon proses eksplorasi migas ini diantaranya protes yang dilakukan warga Kampar. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau pada bulan Juni 2013 untuk meminta Gubernur Riau menolak perpanjangan PT.Chevron mengelola Blok Siak di Kampar. Mereka menolak keterlibatan pihak asing yang dianggap minim kontribusinya bagi daerah (Riau Ekspres 2013).

Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas, dapat terlihat bahwa *Green Prosperity Project* merupakan salah satu upaya pemerintah AS untuk melindungi perusahaan-perusahaan AS dari respon negatif yang muncul

akibat dampak eksplorasi migas ini. Dengan mengembangkan masyarakat di daerah proyek, maka akan tercipta situasi yang kondusif sehingga proses eksplorasi produksi perusahaan AS di daerah proyek ini dapat berjalan dengan baik. Pemberian bantuan yang berwawasan lingkungan di daerah sekitar proyek juga merupakan upaya Pemerintah AS untuk membuktikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, baik secara langsung dalam hubungannya dengan masyarakat maupun dalam hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi kelangsungan proses eksplorasi sumber daya alam perusahaan-perusahaan AS di Indonesia tersebut dan sekaligus membangun pandangan positif masyarakat Indonesia dan internasional atas komitmen AS untuk isu lingkungan tanpa harus terikat dalam perjanjian internasional. Hal ini menjelaskan keterkaitan motif ekonomi-politik AS dalam *Green Prosperity Project*.

Motif Ekonomi dalam *Community Based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project*

Berbeda dengan *Green Prosperity Project* yang berfokus pada pengolahan lingkungan, proyek ini memusatkan fokus aktivitas pada manusianya. Tercatat bahwa baik dalam *Compact Program* maupun *Threshold Program*, MCC melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat imunisasi terhadap anak-anak di Indonesia. Namun pada *Compact Program*, jenis kegiatan bertambah dengan upaya untuk meningkatkan konsumsi terhadap obat dan suplemen dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat di daerah-daerah proyek. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk farmasi yaitu vaksin dan obat-obatan. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa motif ekonomi tidak dapat dilepaskan dalam isu kesehatan yang terkandung dalam proyek ini. Pada satu sisi, meningkatnya kesehatan ibu dan bayi sangat penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi ini juga akan meningkatkan pasar farmasi bagi perusahaan-perusahaan farmasi, baik domestik maupun internasional.

Saat ini, pasar farmasi masih didominasi oleh produsen-produsen lokal. Merujuk data yang dipaparkan oleh Pharma Business Community tahun 2011 (Pharma Business Community, 2012), perusahaan farmasi lokal menguasai 66% pasar obat di Indonesia, sementara pangsa pasar perusahaan farmasi asing mencapai 34%. Rendahnya pangsa pasar produsen asing dipengaruhi oleh ketatnya kebijakan pemerintah, diantaranya adalah dengan ketentuan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mengatur perusahaan farmasi asing harus bekerja sama dengan mitra lokal dengan komposisi perusahaan asing maksimal

sebesar 75 persen (Pharma Business Community 2013). Sementara itu pada pasar vaksin nasional, perusahaan negara juga masih mendominasi pasar vaksin di Indonesia. Beberapa produsen vaksin yang beredar di Indonesia antara lain adalah Biofarma, Smithkline Beecham Pharmaceutical Indonesia, Aventis Indonesia Pharma, dan Pfizer. PT. Biofarma sebagai perusahaan milik negara masih mendominasi pasar vaksin nasional (Pharma Business Community 2013).

Meskipun demikian, seiring dengan meningkatnya penjualan produk farmasi di Indonesia, produk farmasi yang berasal dari produsen asing juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, penjualan produk farmasi di Indonesia ditargetkan mencapai 5.4 Miliar USD atau naik 14.89% dibanding tahun 2012 (*Pharma Business Community* 2013). Dari estimasi tersebut, penjualan produsen farmasi asing pada tahun 2013 ditargetkan mencapai 1.35 Miliar USD atau mengalami kenaikan sebesar 12% dari tahun lalu. Peningkatan penjualan dialami oleh perusahaan farmasi milik AS, Merck. Penjualan produk farmasi Merck Indonesia mengalami peningkatan penjualan dari tahun 2006 hingga 2010. Penjualan PT. Merck Tbk pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.487.601 Juta dan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 795.689 Juta pada tahun 2010 (Merck 2010).

Namun bukan tidak mungkin, dengan upaya-upaya negosiasi terhadap regulasi pada sektor farmasi maka pasar farmasi di Indonesia akan semakin terbuka pada investor-investor asing. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, pasar farmasi di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan bagi investor. Dalam konteks negosiasi pihak AS dalam bisnis farmas Indonesia, AS memberikan penekanan terhadap regulasi yang dianggap mendiskriminasi perusahaan yang memproduksi secara lintas batas. AS akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk merubah peraturan tersebut agar perusahaan yang bersangkutan dapat memasarkan produknya di Indonesia (U.S. Treasury 2010). Perhatian investor asing AS pada sektor farmasi di Indonesia juga ditunjukkan dalam pertemuan antara Dewan Bisnis AS dalam ASEAN, William Warmon dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2008. Pada akhir pertemuan ini, Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia siap untuk melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) pada sektor industri farmasi (Kontan 2013).

Program MCA akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk kesehatan berupa vaksin dan obat-obatan. Dengan pentingnya pasar farmasi Indonesia bagi AS, proyek ini akan semakin memperluas pasar produk kesehatan AS di Indonesia. Proyek ini terkait pula dengan upaya-upaya AS untuk memperluas pasar farmasi di Indonesia. Dengan adanya proyek ini, akan terjadi permintaan pasar

yang semakin tinggi terhadap produk-produk farmasi diantaranya vaksin, obat-obatan, suplemen, dan vitamin yang berasal dari perusahaan farmasi nasional maupun internasional. Dengan demikian kondisi ini memberikan peluang untuk pasar farmasi AS secara langsung. Hal ini dilakukan Pemerintah AS mengingat sektor farmasi adalah salah satu sektor investasi yang penting bagi perusahaan-perusahaan AS.

Motif Ekonomi dalam Modernization Procurement Project

Modernization Procurement Project didesain untuk melakukan reformasi birokrasi (juga sebagai bagian dari *control of corruption*) terkait sistem pengadaan barang dan jasa publik. Dibawah koordinasi LKPP, ada 2 kegiatan utama yang menjadi fokus kegiatan ini (MCA Indonesia 2013). Kegiatan pertama adalah meningkatkan fungsi pengadaan melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisasi fungsi pengadaan. Dalam kegiatan pertama ini ada 2 sub kegiatan yang dirancang yaitu: 1) membentuk struktur Kelembagaan dan Profesionalisasi yang disebut Procurement Service Unit (PSU), dan 2) Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan. Adapun kegiatan kedua mendukung pengembangan kebijakan dan prosedur pengadaan melalui 2 sub kegiatan yaitu: 1) Tender Kompetitif dan 2) Prosedur untuk Sub Kegiatan Pembelian Berkesinambungan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini diharapkan dapat mempercepat agenda reformasi pembelian pemerintah dan mengubah system pembelian public di Indonesia. Dengan demikian akan dicapai penghematan biaya dan terciptanya efisiensi pengadaan barang dan jasa. Penghematan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Proyek ini adalah lanjutan dari *Threshold Program* MCA khususnya pada bidang pengendalian korupsi di Indonesia, dengan mendukung usaha LKPP untuk memperkenalkan praktek-praktek pembelian modern ke Indonesia. USAID yang berperan sebagai pelaksana *Threshold Program* mendukung perluasan sistem pembelian elektronik LKPP melalui pembentukan 5 (lima) pusat pembelian regional. Lebih jauh, proyek ini diklaim sebagai bentuk dukungan AS terhadap upaya mencapai pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam pernyataan Hillary Clinton dalam upacara penandatanganan compact agreement antara Indonesia dan MCC, “*The third leg of this compact reflects Indonesia's commitment to being a leader in open and transparent government*” (US Department of State, 2011).

Dengan proyek Modernisasi Pengadaan, pemerintah dan masyarakat Indonesia diharapkan dapat menghemat sebesar 15 Miliar dolar AS per

tahun (MCA Indonesia 2014). Dalam pernyataannya, Hillary Clinton juga membahas posisi Indonesia dalam *Open Government Partnership* (OGP) (U.S. Department of State 2011). OGP merupakan upaya global untuk membuat pemerintah lebih transparan, efektif dan akuntabel, melalui pemberdayaan warga negara dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, ketika 8 negara pendiri (Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat) menyetujui suatu Deklarasi Pemerintah Terbuka (OGP Indonesia, 2013). Saat ini OGP memiliki 58 negara anggota dan terus mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu pendiri dan anggota *steering committee*, Indonesia dapat mengimplementasikan praktik pemerintahan yang lebih modern. Pemerintahan yang lebih terbuka dapat menghemat pengeluaran, mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas (US Department of State 2011).

Seperti yang dijelaskan diatas, proyek ini dalam konteks MCA terkait erat dengan pembentukan pemerintahan yang terbuka (*open government*). Pemerintahan yang lebih terbuka akan menghasilkan regulasi-regulasi yang lebih terbuka terhadap aktivitas perdagangan dan investasi dengan perusahaan-perusahaan asing. Hal ini tentu menguntungkan AS terkait usaha-usahanya untuk dapat melonggarkan regulasi di Indonesia. Dengan adanya pemerintahan yang lebih terbuka, perusahaan asing dapat dengan leluasa memasuki pasar Indonesia dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lokal. Hal ini akan menciptakan iklim yang kompetitif bagi perusahaan AS. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan keuntungan komersial bagi perusahaan AS seiring terbentuknya iklim yang kondusif bagi persaingan perusahaan-perusahaan ini.

Motif ekonomi dan politik dalam proyek MCA Indonesia sejalan dengan rasionalisasi pemberian bantuan luar AS mengenai kepentingan *image building* dan komersial. *Image Building* dibutuhkan AS terkait pandangan negatif masyarakat internasional terhadap rendahnya komitmen AS dalam isu lingkungan ataupun *climate change*. Di sisi lain, bantuan luar negeri sejak lama digunakan AS untuk meningkatkan ekspor dengan menciptakan pelanggan baru terhadap produk AS dan menciptakan iklim ekonomi dimana perusahaan-perusahaan milik AS dapat bersaing didalamnya (Tarnoff 2012). Pemanfaatan MCA sebagai upaya untuk meraih kepentingan komersial AS juga dikuatkan oleh Mawdsley (2007) yang berargumen sebagai berikut,

“The newly invigorated security-development paradigm is being used to legitimate more spending on 'development' programmes which are primarily intended to serve the interests of US consumers, manufacturers and investors.” (Mawdsley 2007)

Keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh AS dalam Program MCA juga didukung oleh mekanisme MCC dimana lelang terhadap proyek dalam MCA Indonesia dibuka secara internasional. Dengan demikian, baik individu maupun perusahaan asing AS dapat menjadi konsultan atau vendor yang menjalankan proyek MCA Indonesia. Dalam masa periode penulisan artikel ini, telah terpilih beberapa vendor dalam proyek-proyek MCA. Hal ini menegaskan bahwa pemberian bantuan MCA AS ke Indonesia lebih terkait dengan motif ekonomi dan politik-keamanan ketimbang motif lingkungan dan humanitarian (lihat skema motif dan kepentingan, Degnboll 2003). Padahal program ditujukan untuk mengatasi isu lingkungan, kesehatan dan reformasi birokrasi. Namun, perlu dipahami juga bahwa walau terkesan motif ekonomi mendominasi program MCA AS, program ini seyogyanya juga dipahami sebagai bagian dari payung besar agenda keamanan nasional AS. Hal ini mengingat MCA sebagai sebuah gagasan yang dihasilkan pasca peristiwa 9/11 yang kemudian menempatkan isu keamanan nasional kembali menjadi isu sentral dalam pemberian bantuan luar negeri AS.

Simpulan

Pemilihan Indonesia sebagai negara yang berhak menerima hibah *compact program MCA* menjadi hal yang menarik untuk dikaji mengingat performa Indonesia yang masih buruk pada salah satu indikator penting MCA yaitu korupsi. Dari hasil analisis yang telah dilakukan ditemukan bahwa pemberian MCA ke Indonesia tidak secara murni ditujukan untuk penanganan masalah lingkungan, kesehatan dan reformasi birokrasi di Indonesia, akan tetapi sangat kental dengan motif ekonomi dan politik AS seperti yang telah dijelaskan diatas. Dari temuan studi ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat secara jeli melihat adanya kemungkinan-kemungkinan ketimpangan kepentingan dalam negosiasi MCA. Pemerintah hendaknya dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam segala sektor yang berhubungan dengan MCA. Dengan demikian, pendanaan yang didapatkan Indonesia dari MCA dapat dimaksimalkan sebagaimana mestinya sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam hubungan antara negara donor dan negara penerima bantuan yang seyogyanya berjalan resiprokal, pada faktanya seringkali didominasi oleh negara donor. Upaya pemerintah Indonesia untuk menaikkan posisi tawar dalam negosiasi bantuan luar negeri merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat kini posisi negara berkembang sebagai negara penerima bantuan telah berada pada posisi yang lebih seimbang dengan negara donor. Hal ini diatur dalam Deklarasi Paris pada tahun 2005 yang menyatakan komitmen negara donor untuk mentaati lima prinsip efektivitas bantuan (*Paris*

Declaration on Aid Effectiveness) yaitu kepemilikan, keselarasan, harmonisasi, tanggung jawab bersama, dan berorientasi pada hasil. Hal ini merupakan titik tolak yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi bantuan luar negeri.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Davenport, D.S. 2006. *Global Environmental Negotiations and U.S. Interest*. New York: Palgrave Macmillan.
- Martinussen, J. D. & E. Pedersen. 2003. *Aid: Understanding International Development Cooperation*. London: Zed Books Ltd.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press.

Artikel Jurnal dan Jurnal Elektronik

- Mawdsley, E. 2007. *The Millennium Challenge Account : Neo Liberalism, Poverty and Security. Review of International Political Economy* **14** (3).
- Radelet, S. 2003. *Bush and Foreign Aid, Foreign Affairs* September/Oktober, **82** (5): 104.
- Rice, C. 2000. *Promoting the National Interest, Foreign Affairs*, **79**(1): 47.
- Picard, L.A. et al. 2008. *Foreign Aid and Foreign Policy : Lessons for the Next Half Century*. New York : M.E Sharpe.
- Riddell, R. C. 2007. *Does Foreign Aid Really Work?*. Oxford: Oxford University Press.
- Trap, F. 2000. *Foreign Aid and Development*. London: Routledge.

Artikel Online

- Carnegieendowment.org, t.t. *United States Bilateral Nuclear Cooperation*. [online]. dalam <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=20042&prog=zgp&proj=znpp> [diakses 26 Mei 2010].
- Clifton, Eli, 2007. *123 Nuclear Agreement Completed*. [online]. dalam <http://ipsnews.net/print.asp?idnews=38700> [diakses 20 Desember 2009].
- Federation of American Scientist, 2002. *Strategic Security Project*. [online]. dalam <http://www.fas.org> [diakses 2 September 2009].

- Krishnaswarni, S., 2006. *Indo-US N-deal a Historic Opportunity*. Rediff India Abroad. [online]. dalam <http://www.rediff.com/news/2006/mar/22nddeal.htm> [diakses 26 Mei 2010].
- Raman, J. Sri, 2009. *The US-India Nuclear Deal-One Year Later*. [online]. dalam <http://www.thebulletin.org/archive/> [diakses 20 November 2009].
- The Times of India, 2008. *US House Approves Indo-US Nuke Deal*. [online]. dalam http://timesofindia.indiatimes.com/US_House_approves_Indo-US_nuke_deal/articleshow/3535443.cms [diakses 24 Mei 2010].
- The Acronym Institute, 2008. *Disarmament Diplomacy*. [online]. dalam <http://www.acronym.org.uk> [diakses 28 April 2010].

Working Paper

- Alesina, A & D. Dollar. 1998. *Who Gives Foreign Aid to Whom and Why*. NBER Working Paper No.6612.

Sumber Online

- Antara. “Mamuju Targetkan Investasi Rp 5 Triliyun2015” [online]. dalam <http://www.antarasusel.com/print/27584/mamuju-targetkan-investasi-rp5-triliun-2015> [diakses 18 Juni 2013].
- Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Seksi Mahasiswa Universitas Indonesia (IATPISMUI), 2013. “8 Daerah Penghasil Minyak Terbesar di Indonesia” [online]. dalam <http://iatmi-smui.org/news/144-isiot> [diakses 1 Juni 2013].
- Jakarta Post, 2011. RI Ranks 100th in 2011 Corruption Perception Index. [online]. Dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/01/ri-ranks-100th-2011-corruption-perceptionindex.html> [diakses 17 Februari 2013].
- Kontan, 2012. N.N. “Pemerintah akan Tinjau Aturan DNI Farmasi” [online]. dalam <http://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-tinjau-aturandni-farmasi> [diakses 17 Juni 2013].
- MCA Indonesia. Kemakmuran Hijau, [online]. dalam http://mcaindonesia.go.id/in/main_ind/content3/69/58/169, [diakses 12 Mei 2013].
- MCA Indonesia, 2014. “Proyek Modernisasi Pengadaan” [online]. dalam http://mca-indonesia/goid/wpcontent/uploads/2013/12/Factsheet_PM_ID.pdf [diakses 14 Mei 2015].
- MCC, 2010a. “2010 Country Scorebook” [online]. dalam <http://www.mcc.gov/documents/reports/mcc-2010-scorebook.pdf> [diakses 9 April 2013].
- MCC, 2010b. *Guide To The MCC Indicators And The Selection Process. Fiscal Years 2011* [online]. dalam <http://www.mcc.gov/documents/>

- reports/reference-20100010_40503-_fy11guidetotheindicators.pdf [diakses 9 April 2013]
- MCC. t.t. *About MCC* [online]. dalam <http://www.mcc.gov/pages/about> [diakses 11 April 2013].
- National Center for Public Policy Research. Byrd-Hagel Resolution. 1997. <http://www.nationalcenter.org/KyotoSenate.html> [diakses 26 Mei 2013].
- Open Government Partnership. T.t. [online] dalam http://opengovindonesia.org/?page_id=59 [diakses 19 Juni 2013].
- Pharma Business Community. 2012. *Perusahaan Lokal Kuasai 66 % Pasar Obat Resep. 2012.* [online] dalam <http://indonesiapharmacommunity.blogspot.com/2012/03/perusahaan-lokal-kuasai-66-pasarobat.html> [diakses 17 Juni 2013]
- Pharma Business Community. 2013. *Pemerintah Alokasikanbelanja Obat Dan Vaksin Rp 1.3 Trilyun* [online] dalam <http://indonesiapharmacommunity.blogspot.com/2013/02/pemerintah-alokasikan-belanjaobat-dan.html?m=0> [diakses 17 Juni 2013].
- Riau Ekspres. 2013. “Demo Warga Kampar Minta Gubri Tolak Chevron Kelola Blok Siak” [online]. dalam <http://www.riauexpress.com/read-613-2013-06-12-demo-warga-kamparminta-gubri-tolakchevron-kelola-blok-siak----.html> [diakses 14 Juni 2013].
- Tarnoff, C. 2012. *Foreign Aid: An Introduction to U.S Programs and Policy.* [online] dalam <http://usoda.eads.usaidallnet.gov/docs/foreign-aid-intro.pdf>. [diakses 14 Mei 2013].
- Transparency International. 2009. *Corruption Perception Index.* [online]. dalam http://www.ti.or.id/media/documents/2010/11/10/m/a/materialkit_cpi2009.pdf [diakses 17 Februari 2013].
- U.S. Department of State. 2011. [online]. Dalam *Remarks at Millennium Challenge Corporation Signing Ceremony.* <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/11/177396.htm> [diakses 8 Juni 2013].
- U.S. Treasury. 2010. *Indonesia* [online] dalam http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2010/NTE/2010_NTE_Indonesia_final.pdf [diakses 5 Juni 2013].
- UNFCCC. *Status of Ratification of The Kyoto Protocol* [online] dalam http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php [diakses 25 Mei 2013].
- USAID. 2007. *Millennium Challenge Corporation Indonesia Immunization Project Activity* [online] dalam http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACK409.pdf [diakses 17 Februari 2013].
- USAID. t.t. *Millennium Challenge Corporation Threshold Program for Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP)* [online] dalam http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACK408.pdf [diakses 17 Februari 2013].